

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI

Deva Nur Irawan¹⁾, Toto Kushartono ²⁾, Zaenal Abidin As³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jendral Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.” Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kelurahan Melong, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Fenomena banjir yang terjadi hampir setiap tahun di wilayah ini berdampak signifikan terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah bentuk-bentuk partisipasi menurut Huraerah, yaitu: partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, dan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan dalam penelitian berjumlah delapan orang yang merupakan warga serta aparat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah tampak dalam bentuk ide melalui musyawarah, kegiatan kerja bakti, dan keterlibatan dalam kegiatan mitigasi. Namun, masih terdapat hambatan berupa kurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur seperti sodetan air, serta rendahnya kesadaran sebagian warga dalam pengelolaan sampah. Upaya pelatihan mitigasi juga belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan dukungan pemerintah yang lebih optimal menjadi kunci dalam pengurangan risiko banjir secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Partisipasi, Mitigasi, Banjir, Masyarakat, Penanggulangan.

Abstract

This research is titled “Community Participation in Flood Management in South Cimahi District, Cimahi City.” The study focuses on identifying and analyzing community participation forms in flood mitigation efforts in Melong Subdistrict, including supporting and inhibiting factors. Annual flooding in the area significantly affects the community’s physical, economic, social, and environmental aspects.

This study employs a descriptive method with a qualitative approach. It uses Huraerah’s theory of participation, including intellectual, physical, material, skill-based, and social participation. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, documentation, and literature study. Eight informants were involved, including local residents and government officials.

The results indicate that community participation is evident through ideas shared in meetings, environmental clean-up activities, and engagement in mitigation programs. However, challenges remain, such as limited funding for flood infrastructure and low public awareness about waste management. Moreover, mitigation training has not reached all community members. Broader community involvement and stronger governmental support are essential to sustainably reduce flood risks.

Keywords: Participation, Mitigation, Flood, Community, Management.

PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang kerap terjadi secara musiman dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Fenomena ini terjadi ketika aliran air melebihi kapasitas daya tampung saluran air atau sungai, sehingga meluap dan menggenangi kawasan permukiman maupun ruang-ruang publik di sekitarnya. Sebagai bencana hidrometeorologis, banjir tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan kerusakan fisik infrastruktur, tetapi juga memiliki dampak lanjutan seperti terganggunya kegiatan ekonomi, sosial, dan layanan publik. Kota Cimahi adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki catatan sejarah panjang terkait kejadian bencana, khususnya banjir.

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Kota Cimahi tercatat mengalami lima jenis bencana utama selama periode 2007 hingga 2021, yaitu gempa bumi, kekeringan, banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrem, serta tanah longsor. Di antara berbagai jenis bencana tersebut, banjir menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi dan membawa dampak kerugian yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa banjir merupakan persoalan krusial yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah. Data ini menunjukkan bahwa Cimahi merupakan wilayah yang secara geografis dan ekologis rentan terhadap kejadian banjir.

Sebagai contoh nyata, Kecamatan Cimahi Selatan salah satu dari tiga kecamatan di Kota Cimahi sering kali mengalami peristiwa banjir tahunan. Data dari BPBD Kota Cimahi pada tahun 2024 mencatat bahwa Kelurahan Melong dan Leuwigajah memiliki

jumlah titik rawan banjir yang cukup tinggi. Kelurahan Melong dengan luas wilayah 180 hektar memiliki 12 titik rawan banjir (6,67%), sementara Leuwigajah dengan luas 250 hektar memiliki 25 titik rawan banjir (10%). Tingginya presentase tersebut menandakan bahwa risiko banjir di kedua wilayah ini sangat besar, sehingga menuntut adanya langkah-langkah penanganan yang terencana dan partisipatif.

Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik Kota Cimahi selama enam tahun terakhir memperlihatkan tren fluktuasi jumlah kelurahan terdampak banjir. Pada tahun 2019, tercatat 7 kelurahan mengalami banjir, dan angka tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan total 53 kelurahan terdampak. Meskipun jumlah tersebut sempat menurun pada tahun-tahun berikutnya, yaitu menjadi 17 kelurahan pada tahun 2023 dan 13 kelurahan pada tahun 2024, namun angka ini tetap menunjukkan bahwa banjir masih menjadi ancaman serius di wilayah Kota Cimahi, khususnya di Kecamatan Cimahi Selatan. Secara khusus, Kecamatan Cimahi Selatan tercatat sebagai wilayah yang paling banyak terdampak pada tahun 2024, menandakan bahwa kawasan ini menjadi pusat perhatian dalam isu kebencanaan.

Tingginya kerentanan kawasan Cimahi Selatan terhadap banjir juga diperkuat oleh data intensitas kejadian banjir menurut kelurahan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2024), lima kelurahan di Cimahi Selatan seperti Cibeber, Leuwigajah, Utama, Cibeureum, dan Melong secara berulang mengalami banjir dengan tingkat keparahan yang berbeda. Meski pada tahun 2023 sempat terjadi penurunan kasus banjir menjadi 15 kejadian dari 20 kejadian di tahun sebelumnya, namun angka tersebut kembali meningkat menjadi 17 kejadian pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa penanganan yang telah dilakukan belum mampu mengatasi akar permasalahan banjir secara menyeluruh.

Tingkat risiko banjir juga dapat dilihat dari data jumlah titik genangan di masing-masing kelurahan. Tercatat sebanyak 56 titik genangan tersebar di lima kelurahan di Kecamatan Cimahi Selatan, dengan Cibeureum sebagai wilayah dengan jumlah titik genangan tertinggi (24 titik), disusul oleh Melong (16 titik) dan Utama (11 titik). Banyaknya titik genangan ini menunjukkan bahwa sistem drainase di wilayah tersebut masih belum optimal dan memerlukan evaluasi menyeluruh. Keberadaan titik-titik genangan inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya banjir secara berulang.

Selain itu, dampak ekonomi dan kerugian fisik akibat banjir di Cimahi Selatan juga cukup besar. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2024, Kelurahan Melong tercatat mengalami kerugian tertinggi, mencapai total 162.774,53 juta rupiah yang terdiri dari kerugian fisik sebesar 144.292,50 juta rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 18.482,03 juta rupiah. Kerugian ini mencakup kerusakan rumah warga, rusaknya fasilitas umum, gangguan transportasi dan aktivitas ekonomi, hingga kerusakan lingkungan akibat pencemaran. Bahkan, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 99 orang menjadi korban banjir di wilayah ini, dengan kejadian rumah roboh dan akses jalan yang terputus akibat tingginya genangan air.

Bencana banjir yang terjadi secara berulang menandakan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini masih belum cukup efektif. Pemerintah Kota Cimahi melalui BPBD memang telah mengupayakan berbagai program penanggulangan, seperti pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) sejak tahun 2022 dan penguatan kapasitas masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Namun demikian, realisasi di lapangan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Revitalisasi saluran air, rehabilitasi drainase dan tanggul, serta penertiban bangunan liar memang sudah dilakukan, namun dampak banjir tetap terasa signifikan. Kegiatan seperti

pembangunan long storage di wilayah Cibeber dan Leuwigajah pun belum sepenuhnya mengatasi persoalan banjir secara struktural maupun non-struktural.

Dalam konteks ini, peran serta masyarakat menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Menurut Santoso (2014), penanggulangan banjir akan berhasil jika masyarakat turut dilibatkan secara aktif. Masyarakat yang mengenal lingkungannya dengan baik memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal, menetapkan prioritas tindakan, serta melakukan upaya responsif sesuai potensi dan keterbatasan yang ada. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kontribusi mereka dalam memberikan ide atau gagasan, keterlibatan fisik dalam kegiatan kerja bakti, kontribusi harta benda, hingga perubahan perilaku yang mendukung pengurangan risiko bencana.

Program-program peningkatan kapasitas masyarakat yang telah dilaksanakan seperti KATANA (2022), Keluarga Tanggap Bencana Alam (2023), dan peran pemerintah dalam penanggulangan bencana (2024) menunjukkan adanya tren peningkatan kesadaran masyarakat. Jumlah total partisipan dalam ketiga program tersebut mencapai 570 orang. Meningkatnya jumlah peserta dari tahun ke tahun memberikan sinyal positif akan adanya keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Namun, capaian ini belum sepenuhnya menjawab tantangan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan terorganisir.

Fenomena yang ditemukan di Kelurahan Melong misalnya, memperlihatkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat belum optimal. Masih terbatasnya ide dalam forum musyawarah, kurangnya keaktifan warga dalam kerja bakti, tidak adanya kontribusi dalam bentuk dana atau fasilitas, serta rendahnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan menunjukkan bahwa partisipasi masih bersifat sporadis dan belum terstruktur. Selain itu, kegiatan pelatihan dan sosialisasi mitigasi bencana belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sehingga

menimbulkan kesenjangan dalam hal pemahaman dan keterlibatan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam sejauh mana partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Cimahi Selatan, khususnya di Kelurahan Melong. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bentuk-bentuk partisipasi yang telah dilakukan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta upaya-upaya strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana banjir. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena partisipasi masyarakat secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks sosial yang nyata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan delapan orang informan, yang terdiri dari warga Kelurahan Melong, ketua RW, aparat kelurahan, dan perwakilan dari BPBD Kota Cimahi. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung ke lokasi terdampak, mendokumentasikan aktivitas warga dan kondisi lingkungan, serta mempelajari dokumen-dokumen resmi terkait penanggulangan banjir di wilayah tersebut.

Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori partisipasi masyarakat dari Huraerah, yang membagi partisipasi ke dalam lima bentuk utama, yaitu: partisipasi buah pikiran, tenaga, harta

benda, keterampilan, dan sosial. Teori ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat sejauh mana masyarakat Kelurahan Melong berperan aktif dalam upaya penanggulangan banjir.

PEMBAHASAN

Bencana banjir merupakan peristiwa yang berulang dan terus menghantui masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis dan tata kelola lingkungan yang rentan terhadap genangan. Kelurahan Melong yang terletak di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi adalah salah satu contoh konkret wilayah yang mengalami tantangan tersebut secara sistemik. Dalam beberapa dekade terakhir, banjir tidak lagi dianggap sebagai fenomena alam semata, tetapi telah menjadi konsekuensi dari interaksi kompleks antara faktor ekologis, sosial, struktural, dan kelembagaan. Oleh karena itu, penanganan banjir di Kelurahan Melong tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai peran masyarakat, kapasitas pemerintah, serta interaksi antarwilayah.

Topografi wilayah Melong yang rendah serta posisinya yang dikelilingi aliran sungai menjadikannya sangat rentan terhadap banjir. Ditambah lagi dengan tingginya curah hujan dan seringnya luapan sungai, menjadikan banjir sebagai fenomena tahunan yang telah melekat dalam keseharian warga. Wawancara dengan aparatur kelurahan dan warga mempertegas bahwa banjir bukanlah kejadian luar biasa, melainkan menjadi “musim” yang pasti datang. Hal ini berdampak besar terhadap pola hidup masyarakat yang mulai membentuk strategi bertahan (*survival strategy*), seperti menaikkan lantai rumah, membuat sekat air, bahkan menghindari laporan ke kelurahan ketika banjir dianggap “tidak terlalu parah”.

Namun demikian, situasi ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Adaptasi pasif seperti yang dilakukan sebagian masyarakat tidak akan cukup untuk mengurangi risiko jangka panjang. Maka dibutuhkan strategi mitigasi yang komprehensif,

partisipatif, dan adaptif. Di sinilah letak pentingnya partisipasi masyarakat dalam seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra-bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), saat terjadi bencana (respon dan evakuasi), hingga tahap pasca-bencana (pemulihan dan rekonstruksi). Penelitian ini menemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Melong cukup beragam, mulai dari pemberian ide, keterlibatan fisik dalam kegiatan lingkungan, hingga pemberian bantuan barang atau tenaga.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran menjadi indikator awal dari adanya kesadaran kolektif. Masyarakat yang terlibat dalam musyawarah rutin tingkat RT dan RW kerap mengajukan solusi yang konkret terhadap permasalahan banjir. Misalnya, usulan mengenai pembangunan sodetan untuk mengalihkan aliran air sungai, pelebaran sungai di hilir, hingga ide pengadaan alat pengukur debit air agar masyarakat lebih siap siaga menghadapi kenaikan permukaan air. Ide-ide tersebut lahir dari pengalaman lapangan yang otentik, di mana warga menjadi saksi dan korban langsung dari peristiwa banjir yang terjadi berulang. Sayangnya, meskipun ide-ide tersebut visioner dan aplikatif, realisasinya masih terhambat oleh kendala klasik seperti keterbatasan anggaran, tumpang tindih kewenangan antarwilayah, serta tidak adanya mekanisme partisipatif yang formal untuk menjembatani antara ide masyarakat dan implementasi kebijakan.

Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya difasilitasi oleh sistem yang inklusif. Forum-forum pengambilan keputusan masih bersifat sektoral dan elitis, lebih banyak melibatkan pengurus RT, RW, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat, sementara warga biasa belum banyak dilibatkan. Ini menciptakan kesenjangan partisipasi yang berpotensi menghambat efektivitas penanganan banjir. Padahal, berdasarkan pendekatan partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Arnstein (1969) dalam "Ladder of Citizen Participation", pelibatan masyarakat yang bermakna seharusnya berada pada tingkat citizen power di mana

masyarakat tidak hanya diminta pendapatnya, tetapi juga diberi ruang untuk mempengaruhi dan mengambil keputusan. Kondisi di Kelurahan Melong masih berada pada tangga partisipasi yang rendah, di mana masyarakat lebih banyak didengar, tetapi belum diberdayakan secara penuh.

Partisipasi dalam bentuk tenaga atau fisik juga menunjukkan peran penting masyarakat dalam menanggulangi banjir secara swadaya. Kegiatan kerja bakti menjadi rutinitas sosial yang memperkuat ikatan komunitas sekaligus sebagai bentuk aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Program-program seperti "Jumat Bersih" atau gerakan sukarela melalui tim “kecebong” merupakan wujud nyata dari kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari mitigasi banjir. Tidak hanya warga dewasa, pemuda, dan ibu-ibu, tetapi juga kelompok relawan lokal turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Mereka membersihkan selokan, mengangkat sampah, hingga melakukan pengerukan saluran air.

Meski demikian, kegiatan ini masih bersifat reaktif dan temporer. Saat curah hujan tinggi kembali terjadi, selokan yang sempat dibersihkan pun kembali dipenuhi sedimentasi karena tidak adanya sistem pencegahan jangka panjang yang kuat. Ini memperlihatkan bahwa kerja bakti meski penting, belum cukup apabila tidak dibarengi dengan perencanaan tata ruang, pemetaan wilayah rawan, dan sistem drainase yang baik. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi penting untuk menyambungkan semangat gotong royong masyarakat dengan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.

Persoalan klasik lainnya yang ditemukan adalah rendahnya partisipasi dalam bentuk uang. Warga cenderung enggan memberikan kontribusi finansial, karena merasa bahwa tanggung jawab penanganan banjir ada pada pemerintah. Wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar warga keberatan dengan sistem iuran karena tidak ada jaminan bahwa dana akan dikelola secara

transparan dan efektif. Sementara itu, pemerintah sendiri juga mengalami keterbatasan anggaran karena dana penanggulangan bencana di tingkat kelurahan tidak menjadi prioritas utama dalam APBD. Akibatnya, berbagai ide cemerlang dari masyarakat tidak kunjung dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran khusus. Kondisi ini memunculkan apa yang disebut oleh Ostrom (1990) sebagai *tragedy of the commons*, di mana masyarakat mengandalkan pihak lain (dalam hal ini pemerintah), sementara pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang benar-benar mengambil tanggung jawab penuh.

Bentuk partisipasi lainnya yang meskipun kecil namun berdampak signifikan adalah penyediaan alat dan konsumsi saat kegiatan sosial berlangsung. Warga dengan kesadarannya membawa alat kebersihan dari rumah, menyediakan makanan untuk sesama peserta kerja bakti, hingga bersedia membuka rumah sebagai tempat pengungsian sementara bagi warga lain yang terdampak banjir. Ini menunjukkan bahwa nilai gotong royong masih melekat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Melong. Partisipasi jenis ini biasanya tidak tercatat dalam dokumen formal, tetapi sangat berperan dalam membangun resiliensi masyarakat terhadap bencana.

Namun, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang membuat penanggulangan banjir di Kelurahan Melong belum optimal. Salah satunya adalah perilaku membuang sampah sembarangan yang masih ditemukan meskipun telah dilakukan sosialisasi, pemasangan CCTV, hingga pemberlakuan sanksi. Kurangnya kontrol sosial dan lemahnya penegakan aturan menyebabkan sebagian masyarakat masih melakukan praktik buruk tersebut. Masalah lainnya adalah pembangunan liar di bantaran sungai yang masih terus berlangsung. Hal ini menyebabkan penyempitan sungai dan semakin tingginya risiko luapan air. Pemerintah telah memberikan imbauan, tetapi belum memiliki mekanisme penertiban yang tegas dan efektif.

Kelemahan lainnya adalah belum optimalnya edukasi dan

pelatihan kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana. BPBD telah memiliki berbagai program pelatihan seperti RW Siaga Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana, namun informasi mengenai program ini belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Sebagian warga bahkan tidak mengetahui adanya pelatihan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi vertikal antara pemerintah dan warga masih lemah, padahal edukasi adalah kunci dalam membangun kesadaran dan partisipasi jangka panjang.

Kondisi wilayah yang berada di perbatasan juga turut memperumit persoalan. Sungai yang melintasi Kelurahan Melong juga mengalir melalui Kabupaten Bandung, sehingga upaya penanganannya tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Kota Cimahi. Butuh kerjasama lintas wilayah dan sinergi antarinstansi untuk dapat merumuskan solusi jangka panjang seperti pelebaran sungai, pembangunan tanggul, atau sistem drainase terpadu. Namun hingga kini, koordinasi lintas kota tersebut belum terbangun secara maksimal. Perubahan kepemimpinan, perbedaan prioritas kebijakan, serta ketidakjelasan kewenangan menjadi kendala yang menghambat terwujudnya sinergi antardaerah.

Meskipun berbagai kendala tersebut masih ada, upaya pemerintah untuk tetap mendampingi masyarakat patut diapresiasi. Pemerintah kelurahan secara rutin melakukan koordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, dan instansi lain untuk memberikan bantuan, memelihara drainase, serta merespons cepat saat terjadi banjir. Program bantuan logistik dan tanggap darurat tetap dilaksanakan setiap musim penghujan tiba. Namun sekali lagi, tanpa partisipasi masyarakat yang lebih luas dan inklusif, upaya tersebut akan berjalan tidak optimal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kelurahan Melong telah berjalan, tetapi belum merata dan belum sepenuhnya diberdayakan. Perlu adanya penguatan kapasitas warga melalui edukasi dan pelatihan, perbaikan sistem komunikasi antarwarga

dan pemerintah, serta penciptaan mekanisme yang mampu menjembatani antara aspirasi warga dan kebijakan publik. Pemerintah juga perlu memastikan adanya anggaran khusus untuk wilayah rawan banjir, serta meningkatkan koordinasi dengan wilayah administratif lainnya guna menangani persoalan yang bersifat lintas batas.

Melalui pendekatan yang terintegrasi, partisipatif, dan kolaboratif, maka penanggulangan banjir tidak lagi hanya menjadi rutinitas reaktif setiap musim hujan, tetapi berubah menjadi upaya kolektif yang berkelanjutan untuk membangun komunitas yang tangguh bencana dan ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, telah berjalan dalam beberapa bentuk, terutama partisipasi pikiran, tenaga, dan sosial. Namun, partisipasi dalam bentuk materiil dan keterampilan masih terbatas. Faktor-faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran warga dan keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar yang harus diatasi bersama.

Pemerintah Kota Cimahi telah menunjukkan upaya serius dalam penanggulangan banjir, namun keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sistem penanggulangan banjir yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Arikunto, Suharsini. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J..2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1996. Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press.

Jurnal

Anura, H. K. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Risiko Bencana Banjir di Lingkungan Bugis Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Astuti, A. F., & Sudarsono, H. (2020). Analisis penanggulangan banjir sungai kanci. *Jurnal Konstruksi dan Infrastruktur: Teknik Sipil dan Perencanaan*, 7(3).

Dachi, R. A., Hutajulu, J., & Sinaga, J. (2023). Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Banjir Di Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Aur, Kota Medan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(2), 261-271.

Deasy, A. (2020). STRATEGI PENANGULANGAN BENCANA BANJIR BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT DI KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Indarwati, O., Azhari, A. K., & Suharsono, A. KUALITAS PELAYANAN KARTU KUNING (AK-1) BAGI PENCARI KERJA PADA DINAS.

Kholifah, A. D. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mengurangi risiko bencana banjir di perumahan Sawangan Asri Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Laksana, N. S. (2013). Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, 1(1), 56-66.

LENGKEY, C., PANGKEY, M., & LONDA, V. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(89).

Metuak, N., Nayoan, H., & Sumampow, I. (2022). Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado). *GOVERNANCE*, 2(2).

Muhibbin, M., Sugiharto, U. S., & Parmono, B. (2018). Partisipasi Masyarakat Kota Malang Dalam Pencegahan Bencana Banjir. *Negara dan Keadilan*, 7(1), 218-238.

NINGRUM, L. A. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP MITIGASI BENCANA BANJIR DI DESA BAGELEN KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020.

Nuraini, A. (2021). Efektivitas pelayanan publik pada kantor kelurahan Leok 1 kecamatan Biau kabupaten Buol. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2567-2574.

Nurhardinta, M. F. (2023). PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KELURAHAN TANGGUH BENCANA DI KOTA SEMARANG.

Rahcmawati, F., & Choiriyah, I. U. (2024). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 51-62.

Rahma, A. N., & Purbaningrum, D. G. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Perumahan Bukit Sawangan Indah Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojong Sari Kota Depok. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 88-109.

Razikin, P., Kumalawati, R., & Arisanty, D. (2017). Strategi penanggulangan bencana banjir berdasarkan persepsi masyarakat di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 4(1).

Santoso, W. R., & Sujianto, S. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(2), 31565.

Syofyan, Z. (2022). Kolam Retensi Sebagai Upaya Pengendalian Banjir Pada Daerah Aliran Sungai Batang Pangian. *Rang Teknik Journal*, 5(1), 124-136.

Umeidini, F., Nuriah, E., & Fedryansyah, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 13-22.

Widhiaksono, H. (2009). Upaya mempertahankan kelestarian hutan dengan memanfaatkan kearifan lokal pada masyarakat desa hutan.

Yanti, V. (2020). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan (Studi Kasus Perumahan Bukit Pamulang Indah dan Perumahan Lembah Pinus).

Yasin, F. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri.

Munaf, Y., Febrian, R. A., & Setiawan, R. (2018). Penerapan Good Governance di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 4(2), 559-567.

Website

Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.-a).Glosarium. Sirusa BPS. Retrieved November 26, 2022, from <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/istilah/index>

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Desa/Kelurahan yang mengalami Banjir, 2019-2022. BPS Kota Cimahi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Banyaknya Kejadian Bencana Alam Menurut Kelurahan dan Jenis Bencana Alam 2022. BPBD Kota Cimahi.

Dokumen-Dokumen

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. In Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran RI Nomor 5601. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun
2018